



**DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

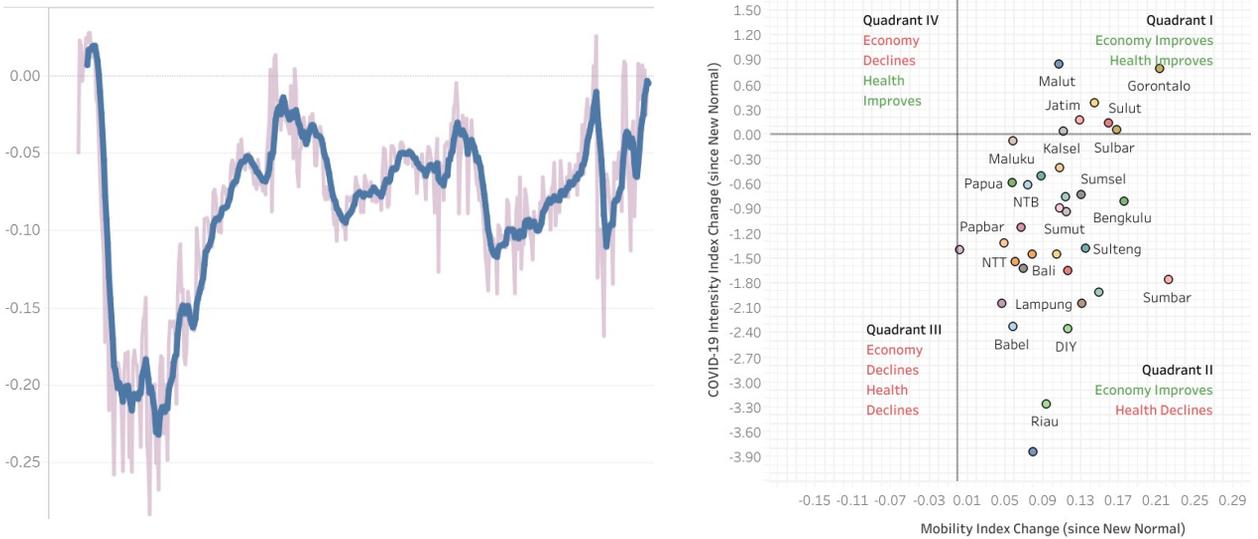
Periode 10 s.d. 21 Mei 2021

Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi  
Subandono • Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo • Miftah Chalamsa  
Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring  
Desy Puspita Anggraeni • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa •  
Khisbatur Rizqiyah



# KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH

## Aktivitas Perekonomian Berdasarkan *Mobility Index* (23 Mei 2021)



- Aktivitas **perekonomian**, berdasarkan *mobility index*\*, mengalami **penurunan** dalam jangka waktu 4 Mei sampai dengan 23 Mei 2021, yaitu dari 0,009 menjadi -0,006.
- Berdasarkan analisis kuadran dengan menggunakan variabel *mobility index* dan *COVID-19 intensity index change* per 23 Mei 2021, seluruh provinsi sudah mengalami peningkatan aktivitas perekonomian jika dibandingkan awal penerapan *New Normal*, dengan **peningkatan tertinggi** ada di **Gorontalo**, sedangkan **Papua Barat tidak terlalu signifikan peningkatannya**.

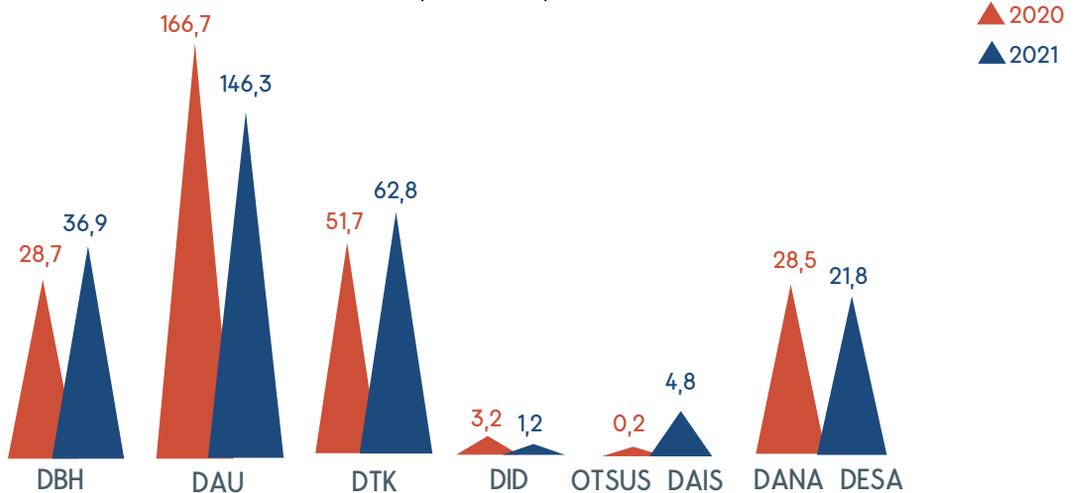
► \*Data CSIS

# KINERJA TKDD DAERAH

## Realisasi TKDD

### Realisasi s.d. 21 Mei 2021 YoY

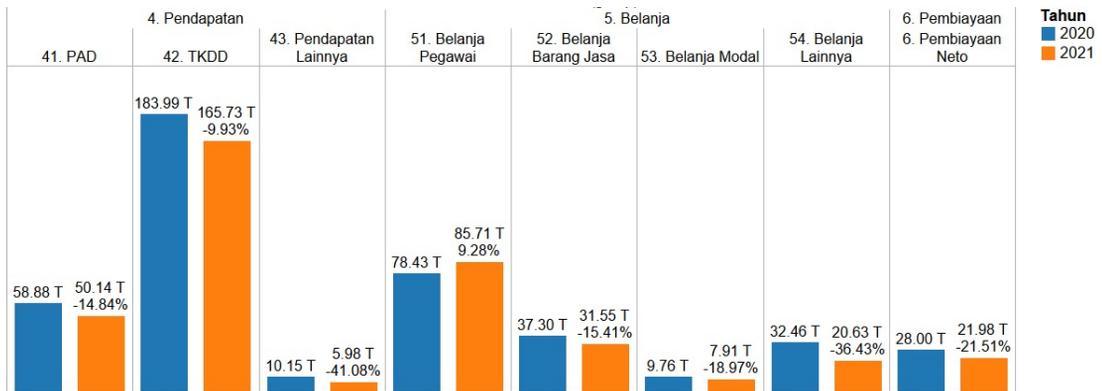
(dalam triliun)



- Secara YoY, realisasi s.d. **21 Mei 2021** sebesar Rp273,9 Triliun mengalami **penurunan 1,9%** dibandingkan realisasi s.d. 21 Mei 2020 sebesar Rp279,08 Triliun.
- **DAU** mengalami **penurunan** sebesar **12,3%**, karena masih terdapat beberapa daerah yang belum memenuhi persyaratan kinerja. Sedangkan **DBH** mengalami **kenaikan** sebesar **28,6%**, **DTK** **naik 21,5%**, dan **Dana Desa** **turun 23,4%**.
- Realisasi BLT Desa sebesar Rp3,0 Triliun kepada 137.948 KPM.

# KINERJA FISKAL DAERAH

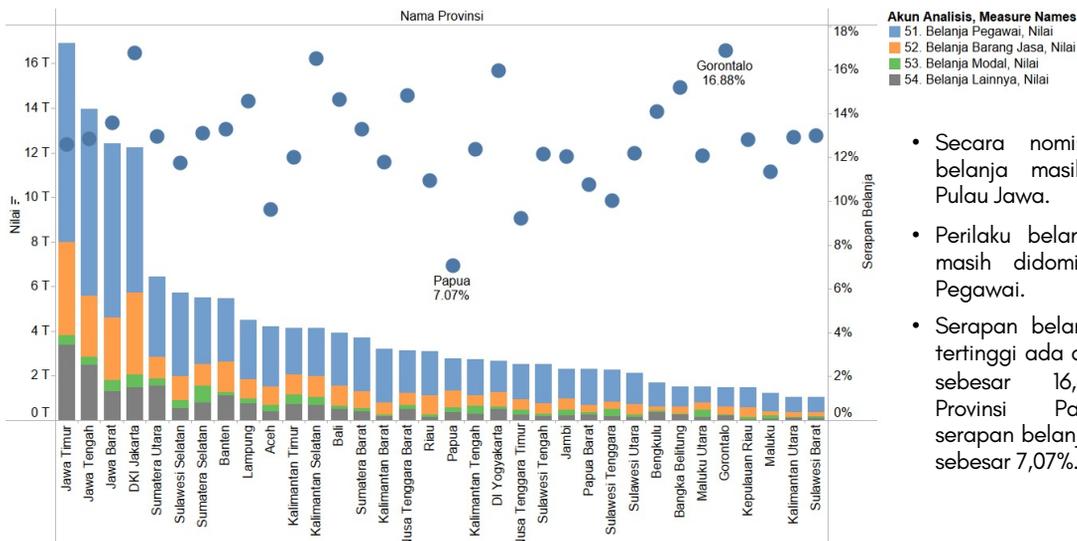
## Realisasi APBD s.d. April - YoY



- Realisasi Pendapatan 2021 terkontraksi sebesar 11,99% (YoY) dari Rp251,70 T menjadi Rp221,51 T. Penurunan terjadi di PAD sebesar 14,84%, terutama penurunan yang relatif dalam Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 44,94%.
- Realisasi Belanja 2021 terkontraksi sebesar 7,39% (YoY) dari Rp157,19 T menjadi Rp145,57 T, dengan penurunan tertinggi di Belanja Lainnya sebesar 36,43%, diikuti dengan Belanja Modal turun 18,97% dan Belanja Barang Jasa turun 15,41%. Belanja yang masih mengalami kenaikan adalah Belanja Pegawai sebesar 9,28% dan Bansos sebesar 26,24% dari Rp1,41 T menjadi Rp1,78 T.
- Pembiayaan Neto turun sebesar 21,51% (YoY), terutama penurunan di Penggunaan SILPA TA Sebelumnya sebesar 20,73% dari Rp29,02 T menjadi Rp23,00 T. Sedangkan Penerimaan Pinjaman justru naik sebesar 126,22% dari Rp0,64 T menjadi Rp1,45 T.



- Berdasarkan fungsi/sektornya, realisasi belanja pariwisata mengalami penurunan terdalam sebesar 68,21% dan Perumahan & Fasum sebesar 54,11%.
- Belanja Pendidikan dan Perlindungan Sosial justru mengalami peningkatan, yaitu berturut-turut sebesar 12,66% dan 22,97%.



- Secara nominal, size realisasi belanja masih didominasi dari Pulau Jawa.
- Perilaku belanja s.d. April 2021 masih didominasi oleh Belanja Pegawai.
- Serapan belanja secara agregat tertinggi ada di Provinsi Gorontalo sebesar 16,88%. Sedangkan Provinsi Papua mempunyai serapan belanja agregat terendah sebesar 7,07%.

\* Realisasi s.d. April 2021 bersifat sementara dari 509 Pemda yang sudah menyampaikan data ke SIKD

# KINERJA DAERAH KABUPATEN/KOTA BERKAPASITAS FISKAL TINGGI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal, terdapat 128 dari 508 kabupaten/kota di Indonesia atau 25,2% kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi (40 sangat tinggi dan 88 tinggi). Meskipun memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dan sangat tinggi, namun masih terdapat daerah dengan indikator sosial ekonomi maupun kondisi infrastruktur lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yakni tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, dan indeks pembangunan nasional. Hal ini diduga akibat distribusi jumlah penduduk Indonesia yang tidak merata yakni sebanyak 139.562.638 dari 253.303.411 atau setara 55,1%, terkonsentrasi hanya tinggal di 128 daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi. Dengan demikian, terdapat beban yang cukup berat dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi daerah berkapasitas fiskal tinggi, meskipun pelayanan publik sudah menunjukkan kinerja di atas rata-rata nasional.

Indikator	Tahun	Kabupaten/ Kota Kapasitas Fiskal Tinggi (Rata-rata)	Nasional (Rata-rata)	Status (Di atas/bawah Nasional)
Tingkat Pengangguran Terbuka	2019	5,53	4,77	atas
Balita Stunting (%)	2019	27,30	27,96	bawah
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	2020	8,50	8,48	atas
Harapan Lama Sekolah	2020	13,09	12,98	atas
Penduduk Miskin (%)	2020	10,30	9,78	atas
PDRB (juta rupiah)	2020	65.091.124	25.728.060	atas
PDRB per kapita*	2020	68.261.687	62.319.250**	atas
IPM	2020	71,62	71,94	bawah
IKK	2020	106,77	108,69	bawah
Kondisi Jalan Mantap (%)	2019	69,75	58,73	atas
Rumah Tangga Air Minum Layak (%)	2018	74,34	73,68	atas
Rumah Tangga Sanitasi Layak (%)	2018	71,74	69,27	atas

\*PDRB tahun 2020 dibagi jumlah penduduk tahun 2019

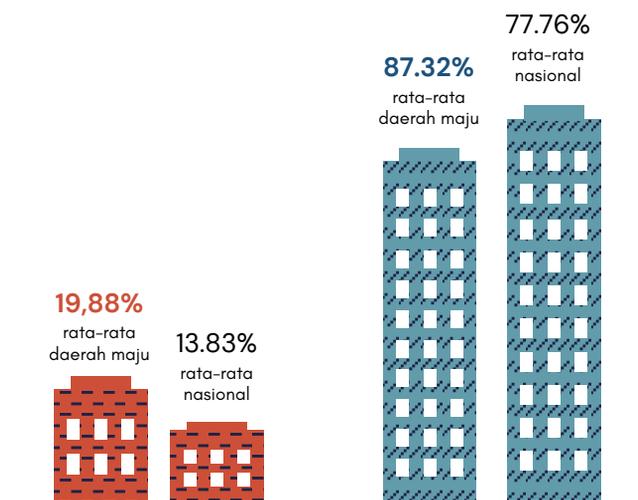
\*\*Setara dengan USD4.357,99 dengan kurs 1USD=Rp14.300,00

Pada sisi fiskal daerah, **APBD pada daerah kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi cenderung memiliki kemandirian yang lebih tinggi dari rerata nasional**. Hal ini berarti pula semakin rendahnya tingkat ketergantungan daerah-daerah tersebut terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

## APBD

**2020** Proxy Kemandirian  
(PAD/Total Pendapatan)  
 status: di atas nasional

Proxy Ketergantungan  
(TKDD/Total Pendapatan)  
 status: di bawah nasional



➤ sumber: APBD 2020

## Daerah Kapasitas Fiskal Tertinggi dan Indikator Kinerja Sosial Ekonomi

Kemampuan keuangan daerah di Indonesia, yang dilihat melalui kapasitas fiskalnya, mempunyai tingkatan yang bervariasi sesuai dengan **pendapatan daerah, keadaan sosial ekonomi, dan infrastruktur** daerahnya. Sebagian besar daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi berada di wilayah Jawa, mengingat daerah-daerah di wilayah Jawa mempunyai sumber pendapatan yang cukup besar, PDRB yang lebih tinggi, serta SDM dan infrastruktur yang lebih baik. Berdasarkan **PMK Nomor 120/2020** tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, terdapat Tiga (3) kelompok besar sumber pendapatan yaitu:

- 1** Pendapatan Asli Daerah **2** Transfer ke Daerah dan Dana Desa **3** Lain-lain Pendapatan yang Sah

### ► 10 Pemerintah Daerah dengan Kapasitas Fiskal Tertinggi dan Indikator Kinerja Sosial Ekonominya

1	Kota Surabaya	2	Kab. Tangerang	3	Prov. DKI Jakarta
	TKD/ΣPendapatan : 24,95% ▲		TKD/ΣPendapatan : 31,24% ▲		TKD/ΣPendapatan : 26,30% ▲
	% Kemiskinan : 5,02% ▲		% Kemiskinan : 6,23% ▲		% Kemiskinan : 4,53% ▲
	IPM : 82,23 ▲		IPM : 71,92 ▼		IPM : 80,77 ▲
	Jalan Mantap : 99,75% ▲		Jalan Mantap : 85,72% ▲		Jalan Mantap : 96,16% ▲

4	Kota Bekasi	5	Kab. Badung
	TKD/ΣPendapatan : 28,54% ▲		TKD/ΣPendapatan : 9,53% ▲
	% Kemiskinan : 4,38% ▲		% Kemiskinan : 6,91% ▲
	IPM : 81,50 ▲		IPM : 72,39 ▲
	Jalan Mantap : 96,65% ▲		Jalan Mantap : 80,39% ▲



6	Kota Bandung	7	Kab. Bekasi
	TKD/ΣPendapatan : 35,77% ▲		TKD/ΣPendapatan : 33,07% ▲
	% Kemiskinan : 3,99% ▲		% Kemiskinan : 4,82% ▲
	IPM : 81,51 ▲		IPM : 74,07 ▲
	Jalan Mantap : 92,57% ▲		Jalan Mantap : 92,78% ▲

8	Prov. Jawa Barat	9	Kab. Bogor	10	Kota Semarang
	TKD/ΣPendapatan : 39,29% ▲		TKD/ΣPendapatan : 33,97% ▲		TKD/ΣPendapatan : 35,64% ▲
	% Kemiskinan : 7,88% ▲		% Kemiskinan : 7,69% ▲		% Kemiskinan : 4,34% ▲
	IPM : 72,09 ▲		IPM : 70,40 ▼		IPM : 83,05 ▲
	Jalan Mantap : 91,90% ▲		Jalan Mantap : 89,11% ▲		Jalan Mantap : 90,68% ▲

## Tantangan Pembangunan Daerah Kapasitas Fiskal Tinggi



### Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Berkualitas

Seperti halnya individu yang tiba-tiba menjadi orang kaya, jika tidak dapat mengelola kekayaan tersebut dengan baik, maka yang terjadi adalah kekayaan tersebut akan habis sebelum termanfaatkan dengan baik. Hal ini juga berpotensi terjadi terhadap daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, terutama daerah dengan sumber daya alam melimpah. Apabila mereka tidak mampu memanfaatkan momen dengan baik, maka kondisi fiskal yang tinggi tersebut hanya dapat dinikmati oleh generasi saat ini. Sebagaimana orang yang kaya mendadak, maka godaan terbesar adalah **konsumsi untuk hal-hal yang tidak produktif**. Daerah juga dapat terjebak dalam situasi tersebut, kapasitas fiskal yang tinggi bukannya untuk hal-hal produktif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik, namun sebagian besarnya akan digunakan untuk kegiatan operasional pegawai seperti belanja pegawai yang tinggi.



### "Dutch Disease" dan "Resources Curse" dalam pemanfaatan SDA

Kondisi yang terjadi adalah daerah dengan sumber daya alam berlimpah, namun masyarakatnya tidak sejahtera. Tentunya banyak faktor yang terjadi, namun sebagian besar dikarenakan **faktor politik**. Elit daerah berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan kebijakan populis, walaupun itu berpotensi melanggar aturan. Berdasarkan data yang dirilis KPK, beberapa tahun ini telah terdapat 27 kasus korupsi yang terkait dengan sumber daya alam.



### Pengelolaan Sampah

Masalah pengelolaan sampah juga sering menjadi polemik tersendiri bagi daerah-daerah tersebut. Kementerian KLHK menyatakan bahwa volume sampah Kota Surabaya dengan penduduk hampir 3 juta penduduk adalah sebesar 2.800 ton per hari. Kota Bandung menghasilkan 1.300 ton sampah per hari dan sebanyak 10% atau 130 ton tidak terangkut ke TPA, sedangkan Kota Semarang menghasilkan 1200 ton sampah per hari. Untuk itu, solusi penanganan sampah berupa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sudah mulai diperkenalkan di beberapa kota di antaranya Surabaya, Bekasi, Tangerang, Jakarta, dan Bandung.



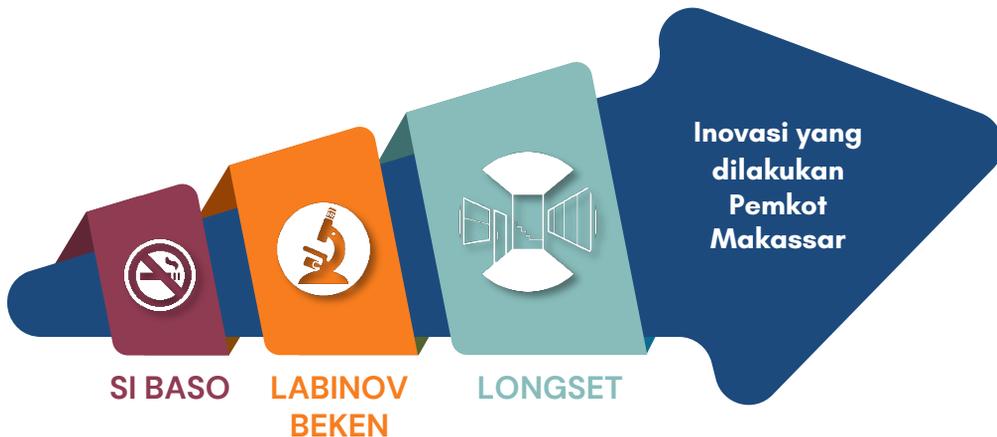
Dengan berbagai tantangan tersebut, **kinerja daerah** dengan kapasitas fiskal tinggi **masih dapat ditingkatkan** lagi, terutama untuk hal-hal yang mendukung prioritas dan target nasional, misalnya, mendukung target nasional dalam memperbaiki kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) Indonesia dari saat ini peringkat 73 dari 190 negara, menjadi peringkat 60 di tahun 2021. Di tingkat ASEAN, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara seperti Singapura (2), Malaysia (12), Thailand (21), dan Brunei (66). Apabila peringkat EoDB Indonesia membaik, maka realisasi investasi hingga tahun 2024 diharapkan mampu tumbuh sebesar 11,7% setiap tahunnya.

Pada akhirnya, pembangunan daerah sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah beserta masyarakatnya dapat menghadapi tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu dilaksanakan antara lain adalah perlunya pemanfaatan SDA yang dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui dibangunnya sebuah framework tata kelola SDA termasuk di dalamnya *Natural Resource Fund* dengan melibatkan sinergi antar *stakeholder*. Salah satu yang perlu dikaji adalah pembentukan dana abadi daerah, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi, namun kinerja layanan sudah baik. Selain itu, daerah perlu mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusianya melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan karakteristik daerah dengan memanfaatkan teknologi. Pembangunan daerah juga dapat ditingkatkan melalui kerjasama dengan kota-kota lain di seluruh dunia melalui *sister city* agar mampu tumbuh menjadi kota berstandar internasional.

# INOVASI DAERAH

## KOTA MAKASSAR SEBAGAI KOTA TERINOVATIF TAHUN 2017 S.D. 2020

Sebagai salah satu kota metropolitan dengan populasi dan IPM tertinggi di Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan daerah dengan kategori Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi sebesar 3,658 di tahun 2020. Tingginya kapasitas fiskal tersebut mampu dimanfaatkan Makassar untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan diapresiasi Kota Makassar sebagai "Kota Terinovatif", dalam ajang Penghargaan Innovative Government Award (IGA). Penghargaan ini sudah empat kali diraih Pemkot Makassar sejak tahun 2017.



### SI BASO INOVASI SISWA BEBAS ASAP ROKOK

Inovasi Siswa Bebas Asap Rokok (SI BASO) merupakan kegiatan Upaya Berhenti Merokok. SI BASO berhasil menurunkan angka perokok pemula di bawah umur 18 tahun melalui kegiatan sosialisasi, pemeriksaan paru, dan konseling. Inovasi SI BASO memiliki keunikan dimana dilakukan dengan jemput bola turun langsung ke sekolah untuk melaksanakan sosialisasi dan konseling layanan UBM di sekolah. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan pemberian pelayanan langsung ke pelajar, sekaligus mendorong kepatuhan siswa lebih tinggi bila dilakukan di sekolah. Penurunan kadar CO pada remaja sebanyak 69,2 % di tahun 2018 dan 76,7% pada tahun 2019.

### LABINOV BEKEN LABORATORIUM INOVASI BERBASIS KEMITRAAN

Labinov BEKEN merupakan program pendampingan bagi seluruh dinas, perusahaan daerah, serta berbagai komunitas di kalangan masyarakat. Fungsi laboratorium adalah sebagai lokasi/tempat diskusi, coaching clinic, analisis dan pengembangan inovasi. Metode yang diterapkan di laboratorium adalah "5D" akronim dari Drum up, Diagnose, Design, Delivery dan Display. Kegiatan ini dilakukan melalui workshop penyusunan inovasi yang didasarkan pada kategori tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya. Labinov BEKEN melibatkan mitra lokal, regional, nasional, hingga internasional yaitu LSM, yayasan, media, Kemenristekdikti, OECD, UNDP PBB. Inovasi ini juga dilakukan untuk menekankan one agency one innovation yang membutuhkan suatu wadah dalam rangka melahirkan inovasi, mengelola inovasi, mengembangkan inovasi dan bahkan mereplikasi inovasi sesuai dengan konten lokal.

### LONGSET LORONG SEHAT

Longset merupakan salah satu inovasi dalam pemecahan masalah kesehatan di kota Makassar dan menjadi program prioritas dalam pencapaian kota Adipura dan kota sehat. Program Longset melakukan pembinaan dan usaha tentang kesehatan melalui manajemen monitoring yang terpadu dengan pendekatan ruang (lorong) berbasis inisiasi dan partisipasi masyarakat. Program ini telah mengembangkan berbagai potensi penanganan lingkungan hidup dengan konsep 3R (*reuse, reduce, recycle*), peran partisipasi masyarakat serta perubahan wilayah dalam pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Hasil dari inovasi ini diantaranya pendataan PHBS mencapai 92,51%, pendataan rumah sehat dengan hasil 48% sehat, 49% kurang sehat dan 35 tidak sehat. Bagi pemkot hasilnya adalah setiap puskesmas memiliki satu Lorong Sehat dan setiap tahunnya ditargetkan bertambah jumlah lorong binaannya.

Inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan ini, mengakselerasi perekonomian ekonomi di Makassar, rata-rata diatas 8% pertahun periode 2016 s.d. 2019, jauh diatas angka pertumbuhan ekonomi Nasional yang berada dikisaran 5%. Demikian juga IPM kota makassar yang terus meningkat hingga mencapai angka 82,25 dan merupakan salah satu angka IPM yang tertinggi di Indonesia.

Uraian	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)				
	2020	2019	2018	2017	2016
Pertumbuhan PDRB Kota Makassar	-1.27	8.79	8.42	8.20	8.03
Wilayah	Index Pembangunan Manusia (IPM)				
	2019	2018	2017	2016	2015
Kota Makassar	82.25	81.73	81.13	80.53	79.94

Dampak pandemi COVID-19 mendorong Sumatera Selatan melakukan berbagai upaya yang bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya melalui pemanfaatan potensi pertanian. Berdasarkan data, luas kawasan budi daya pangan dan hortikultura Sumsel mencapai 2,1 juta hektare, dan kawasan perkebunan 3,8 juta hektare. Untuk mengembangkan sektor pertanian tersebut, Pemprov Sumatera Selatan berupaya memetakan daerah mana saja yang memiliki potensi pangan strategis. Kemudian membangun infrastruktur dan jaringan pemasaran untuk membantu petani menjual hasil produksi pertaniannya, memberdayakan 1.000 penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang direkrut sejak dua tahun terakhir untuk mengedukasi, memotivasi petani meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertaniannya, serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi petani.

<https://sumsel.antaranews.com/>

Salah satu terobosan Pemkot Batam, pembangunan infrastruktur yang berorientasi kesehatan masyarakat dan lingkungan diwujudkan melalui sejumlah proyek prioritas pembangunan diantaranya pembangunan Jalan Bundaran Madani Menuju Ocarina yang dilengkapi dengan fasilitas jogging, pedestrian dan jalur sepeda. Berbagai aktivitas untuk meningkatkan daya tahan tubuh sebagai bentuk pertahanan untuk melawan virus menjadi lumrah dilakukan. Pemkot Batam melihat fenomena tersebut sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas Kota Batam dengan melaksanakan Pembangunan Jalan Kolektor Bundaran Madani sampai dengan Ocarina, Bengkong Sadai. Pembangunan jalan ini juga dilakukan sebagai konektivitas aktivitas perdagangan dan industri pariwisata yang berkembang di seputar kawasan Bengkong Sadai dan sekitarnya.

<https://news.okezone.com/>

Pada hari Jumat, 9 April 2021, Pasuruan menerima penghargaan Kategori Bidang Investasi Daerah dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur karena mampu meningkatkan investasi melalui berbagai strategi pembangunan. Dengan terobosan merubah rencana tata ruang, akhirnya Pemkab Pasuruan mampu mengurangi disparitas wilayah dan menarik investasi masuk. Posisi strategis sebagai jalur segitiga emas, dukungan infrastruktur berupa akses jalan tol yang sudah tersambung, pasokan energi listrik yang masih surplus, jaringan gas yang sudah tersambung, merupakan faktor yang mendukung Kabupaten Pasuruan sebagai tempat tujuan investasi.

<https://www.pasruankab.go.id>

Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, bakal memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Pelayanan dasar dipusatkan untuk memberi kemudahan, kecepatan keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Pemkab Sintang sudah menindaklanjuti rencana pembangunan MPP tersebut dengan membahas penganggaran dan pembiayaan bersama OPD terkait, bahkan tahun ini pelayanan dasar di OPD terkait akan dialihkan ke bekas gedung rumah sakit tersebut. Dukungan dan komitmen pembangunan MPP ini juga datang dari kejaksaan dan kepolisian. Rencananya, pembangunan MPP ini mempersiapkan 19 loket untuk pelayanan perizinan, termasuk perpajakan, retribusi, pelayanan sim, termasuk pelaporan dan lain sebagainya.

<https://pontianak.tribunnews.com/>

Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menargetkan hingga akhir 2022 semua kampung (desa) pada 18 distrik (kecamatan) di wilayah itu sudah bisa menikmati penerangan listrik. Pemkab Mimika terus membangun kerja sama, koordinasi, dan komunikasi intensif dengan pihak PT PLN UP3 Timika agar mempercepat upaya melistriki 133 kampung dan 19 kelurahan di Mimika. Upaya melistriki seluruh kampung dan kelurahan di Mimika sudah dikerjakan oleh PLN selama beberapa tahun terakhir melalui program listrik desa (lisdas), baik yang memanfaatkan pembangkit diesel maupun pembangkit bersumber dari energi terbarukan seperti PLTS dan mikro hidro. Untuk Distrik Mimika Tengah, sudah enam kampung dari tujuh kampung yang menikmati penerangan listrik. Sementara untuk Distrik Mimika Tengah tersisa satu kampung, Mimika Barat Jauh juga tidak lama lagi akan menikmati penerangan listrik.

<https://papua.bisnis.com/>

Pandemi COVID-19 tidak menghentikan semangat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung untuk terus berkarya dan berinovasi dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Bahkan yang terbaru Badung berhasil melahirkan inovasi terbaru yang digagas oleh 3 OPD yakni Dinas Kesehatan, RSD Mangusada, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya sejumlah aplikasi inovasi pelayanan publik yang meliputi e-Cakep (elektronik Catatan Kesehatan Pribadi), e-Health (elektronik Kesehatan), layanan Cath-Lab (operasi jantung) dan khemotherapy (terapi kanker), serta aplikasi Akudicari (Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri dan Cetak Sendiri). Pemkab Badung juga berkeinginan pelayanan kesehatan secara mobile di Badung bisa berjalan dengan kuat seperti penanganan kanker serviks.

<https://bali.tribunnews.com/>

# KAJIAN DAERAH

## Pengembangan Perkotaan Menuju Smart City

Kajian *smart city* ini bertujuan untuk menganalisis profil perkotaan di Indonesia, kondisi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi perkotaan, konsep *smart city* dan pelaksanaannya di Indonesia, serta pendanaan dalam rangka perwujudan *smart city*. Metodologi dalam kajian ini lebih banyak pada studi literatur dan *Focus Discussion Group* dengan pengelola *smart city* di Pemda, unit-unit terkait di Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

*Smart city* merupakan konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Inti konsep *smart city* adalah bagaimana cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi dengan menggunakan teknologi ICT (TIK), yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni.

Pemerintah telah memiliki cita-cita pembangunan kota masa depan sebagaimana RPJPN (2005–2025) dan RPJPN (2025–2045). Proyeksi RPJPN di tahun 2025–2035 Pemerintah berharap seluruh indikator Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) telah terpenuhi sesuai dengan karakteristik kota layak huni, aman, dan nyaman. Selanjutnya tahun 2035–2045, seluruh indikator kota hijau dan berketahanan iklim, serta bencana terpenuhi di seluruh kota. Kemudian pada tahun 2045 ke atas diharapkan seluruh indikator kota cerdas (*smart city*) yang berdaya saing dan berbasis teknologi terwujud di seluruh kota.

Kajian menemukan bahwa meskipun Pemerintah Indonesia telah memiliki target pencapaian *smart city* pada tahun 2045, namun fakta menunjukkan bahwa beberapa kota besar di Indonesia telah berinisiatif untuk merencanakan dan mengelola kota secara cerdas, khususnya kota-kota besar dengan kemampuan keuangan daerah yang cukup, sebagai berikut:

<p><b>J A K A R T A</b></p> <p>Jakarta <i>Smart City Lounge</i> yakni ruang pusat kontrol untuk mengoperasikan <i>smart city</i> melalui TIK. Untuk pilar <i>smart governance</i> Pemrov DKI Jakarta menerapkan <i>E-government</i> melalui PTSP, <i>Jakarta Smart City Portal</i>, implementasi <i>e-Budgeting</i>, serta <i>Citizen Relationship Management Open Data</i>.</p> 	<p><b>S U R A B A Y A</b></p> <p>Surabaya telah memiliki Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, e-SDM, e-Monitoring, e-education, e-permit, e-office, e-health, e-dishub, serta Media Center dan Sistem Siaga Bencana.</p> 	<p><b>D E N P A S A R</b></p> <p>Taman Digital Lumintang dengan fasilitas wifi di ruang publik, juga memiliki Smart Digital Lounge untuk Pelajar (lounge digital yang dikelola secara profesional oleh Masyarakat Industri Kreatif TIK Indonesia (MIKTI) Kota Denpasar, serta Balai Diklat Industri Denpasar)</p> 
<p><b>B A N D U N G</b></p> <p>Memiliki lebih dari 5000 wifi di ruang publik, penggunaan Aplikasi Panic Button untuk menunjang keamanan warga, serta fasilitas Kartu Bandung Pass atau Smart Card.</p> 	<p><b>M A K A S S A R</b></p> <p>Memiliki layanan publik dengan implementasi TIK, seperti pemantauan kemacetan dan sistem pembayaran parkir online, serta penggunaan Makasar Smart Card untuk kepentingan dalam urusan sistem pemerintahan dan pembayaran.</p> 	<p><b>S E M A R A N G</b></p> <p>Memiliki 148 sistem pendukung Semarang Smart City diantaranya sistem informasi perencanaan daerah, informasi monitoring evaluasi, pelaporan warga online terintegrasi, aplikasi CCTV publik, serta sistem perizinan bangunan online.</p> 

# KAJIAN DAERAH

## REKOMENDASI

Dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik kota terutama terkait dengan potensi sumber-sumber pendapatan, serta ketersediaan Badan Usaha Swasta maupun BUMN di wilayah perkotaan, maka dalam rangka memberikan dukungan pendanaan kepada kota agar mampu mengimplementasikan konsep *smart city*, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1 Penguatan *local taxing power* melalui perubahan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan harapan bahwa PAD di kota semakin meningkat.
- 2 Memperkuat peran DAK Fisik dalam rangka memenuhi *necessary condition* melalui penambahan menu kegiatan sebagai berikut:
  - ▶ DAK Prasarana dan Sarana Penanggulangan Kebencanaan Perkotaan
  - ▶ DAK Lingkungan Hidup dengan kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan, pengelolaan persampahan, dan pengendalian pencemaran udara.
  - ▶ DAK Jalan dan DAK Transportasi, dengan menambahkan kegiatan-kegiatan, antara lain kegiatan pembangunan dan pengelolaan Angkutan Multimoda, serta sarana/prasarana penunjang angkutan umum massal.
- 3 Memperkuat peran DAK Fisik dan Hibah Daerah, misalnya:
  - ▶ Kegiatan pengadaan peralatan dan/atau pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) berbasis IT pada DAK Bidang Transportasi, sebagai bagian dari manajemen transportasi dan lalu-lintas di daerah.
  - ▶ Kegiatan pengadaan sistem aplikasi Kesehatan online, pada DAK Bidang Kesehatan Dasar dan Rujukan, untuk menghubungkan sistem pada rumah sakit, puskesmas, balai kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya agar dapat akses dengan mudah secara online terkait ketersediaan kamar, peralatan medis, tenaga kesehatan.
  - ▶ Kegiatan pengadaan sistem aplikasi pendidikan online, pada DAK Bidang Pendidikan, untuk menghubungkan sistem pada Sekolah, baik negeri maupun swasta.
  - ▶ Kegiatan pengadaan instrumen peringatan dini terhadap bencana khususnya yang sering terjadi di wilayah perkotaan padat penduduk, yaitu banjir dan kebakaran.
- 4 Menjadikan inovasi cerdas pemerintahan daerah sebagai salah satu bagian dari kategori penilaian kinerja daerah dalam rangka pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID).
- 5 Mendorong pemerintah kota untuk memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pengadaan sarana-prasarana yang mendukung *smart city*.

(Heri Sudarmanto dkk.)